

## Inisiatif BPD Se-Pujananting, Perdes tentang Ternak dalam Pembahasan



**Barru-** Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Pujananting menginisiasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang penertiban ternak sebagai respons atas berbagai permasalahan yang muncul akibat pemeliharaan ternak yang belum tertib di wilayah pedesaan. Inisiatif ini bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, serta keharmonisan antara aktivitas peternakan, pertanian, dan kehidupan sosial masyarakat desa.

Pemeliharaan ternak yang dilepasliarkan tanpa pengawasan sering menimbulkan gangguan terhadap tanaman pertanian, fasilitas umum, serta keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial antarwarga dan menurunkan kualitas lingkungan desa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas di tingkat desa untuk mengatur tata cara pemeliharaan, pengawasan, serta tanggung jawab pemilik ternak.

BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memandang perlu adanya aturan yang disepakati bersama dan memiliki kekuatan hukum, sehingga penanganan permasalahan ternak dapat dilakukan secara terukur, adil, dan berkelanjutan.

Adapun ternak yang dimaksud meliputi Sapi, Kuda, Kambing dan Unggas, menjadi upaya mensejahterahkan masyarakat dan hidup berdampingan dengan hasil pertanian yang juga digalakkan oleh masyarakat. Menjaga keseimbangan kedua kepentingan ini melalui regulasi di Desa menjadi hal yang diinisiasi dengan kompak oleh 6 (Enam) Lembaga Badan

Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Pujananting, dalam sepekan ini, 15 s/d 22 September 2025.

Kordinator Pendamping Desa Kecamatan Pujananting Rasyidi, bahu membahu dengan mitra sejawatnya Syahrir, mendampingi implementasi Perda Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak yang mengamanahkan pengaturan pemeliharaan, pengamanan, dan kerugian atas ternak di atur oleh Desa.

"Alhamdulillah, BPD Se-Kecamatan Pujananting sepakat untuk bersama-sama menyusun PerDes di Desa masing-masing kemudian memenuhi prosedur pembentukan Perdes sesuai ketentuan aturan, dan kami meminta pendampingan dari Bagian Hukum Pemda Barru dalam semua tahapannya" sebut Rasyidi.

Bimbingan teknis penyusunan Perdes pun telah dilakukan selama 2 (Dua) Hari untuk memahami regulasi tentang penertiban ternak di Pulau Dutungan, Mallusetasi, dan kini memasuki tahapan sosialisasi dan pembahasan secara massif dan serentak di semua Desa se-Kecamatan Pujananting.

"Saat ini, Desa Gattareng, Desa Pujananting, dan Desa Pattappa sudah masuk tahapan sosialisasi, dan BPD desa lainnya sudah mengagendakan sampai Selasa depan" ujar Rasyidi.

Semangat membentuk Perdes melalui hak inisiatif BPD adalah hal baru di Barru yang mendapatkan pendampingan Pemerintah Kabupaten di era kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari, SH, M.Si dan Dr. Ir. Abustan AB.

"Mendampingi lahirnya Perdes Ternak melalui inisiatif BPD adalah hal yang sesuai dengan perintah pimpinan, untuk memastikan masalah ternak dapat ditertibkan di seluruh wilayah Kabupaten Barru", sebut Kabag Hukum, Ardi Susanto.

Dirinya menjelaskan, Pemda juga sedang memproses penyusunan Peraturan Kepala Daerah untuk penertiban ternak di wilayah kelurahan sebagai turunan Perda Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.

"Mohon dukungan masyarakat agar kesadaran akan Barru yang sedang menggalakkan keunggulan di bidang ternak khususnya Bibit Sapi Bali dapat sukses berdampingan dengan Program Ekonomi Berkecukupan yang meminta tiap keluarga memaksimalkan pekarangan rumah untuk menanam sayur mayur dan kebutuhan pangan keluarga" tutup Ardi.(\*)

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pendampingan hukum agar Perdes yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dukungan ini penting untuk memastikan Perdes memiliki legitimasi hukum, dapat diterapkan secara efektif, dan tidak bertentangan dengan kebijakan daerah maupun nasional.

Inisiatif BPD se-Kecamatan Pujananting dalam mendorong lahirnya Perdes tentang penertiban ternak merupakan wujud nyata peran BPD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta lingkungan desa yang lebih tertib, aman, dan harmonis, sekaligus mendorong tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan.